

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Kritik, dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil., Dan Critine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- F.X, Soekarno, 2009, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta.
- H.A.S. Natabaya, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nizam Burhanudin, 2015, *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Yogyakarta.

- Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati, 2008, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Patrialis Akbar, 2015, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmat Bakri, 2010, *Hukum Keuangan Negara Kewenangan BPK dan Pemeriksaan BUMN*, Mars Publishers, Palu.
- Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Zainal Arifin Moechtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

C. Jurnal

Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1.

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani, 2016, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No. 2.

Fery Aferio, 2015, “Kebebasan dan Kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 2.

Gilang Prama Jasa dan Ratna Herawati, 2017, “Dinamika Relasi Antara Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara”, *Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 13 No. 2.

Indra Rahmatullah, 2013, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No 2.

Sunarto, 2016 “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” , *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2.

Tahegga Primananda Alfath, 2015, “Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *E-Jurnal The Spirit Of Law* Vol. 1 No.1.

D. Website

<http://www.bpk.go.id/>

<http://www.dpr.go.id/>

<https://kolom.tempo.co/read/bpk-rasa-partai-politik/>

